

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus menerus dan selektif. Bantuan ini berupa sembako, uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Jaminan ini tercantum pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Utamanya merupakan sebuah bidang kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial yang di dalamnya termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak. Hubungan bantuan sosial dengan jaminan sosial sangat berkaitan karena sangat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Salah satu penyebabnya peningkatan kaum dhuafa yang diakibatkan dari ekonomi yang tidak memadai sehingga membuat para penyandang kaum dhuafa menjadi bingung bagaimana bertahan hidup.

Pemerintah Kota Bogor mengurangi dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat miskin dan rentan adalah kebijakan pemberian bantuan sosial dalam bentuk Program Tangani Warga Dhuafa. Namun, meskipun bermanfaat bagi masyarakat, pelaksanaan Program Tawadhu masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran. Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan standar hidup yang minimal, kemandirian ekonomi, atau untuk membantu rumah tangga dalam mengantisipasi bahaya, karena menurut data BPS Kota Bogor setiap tahun meningkat tingkat inflasi di Kota Bogor Tahun 2020-2021. Pada tahun 2020 sangat terasa signifikan karena terjadi virus Covid-19 yang mewabah, Oleh karena itu secara sederhana dapat saya definisikan Program Tangani Warga Dhuafa yang digagas oleh Dinas Sosial Kota Bogor adalah sebagai program bantuan sosial berupa sembako, alat bedagang dan alat kesehatan untuk membantu kemiskinan dengan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan, dengan Program Tawadhu ini ditujukan untuk memenuhi standar hidup minimum dan membantu rumah tangga. Roda perekonomian perlahan melambat akibat pembatasan kegiatan di bidang perdagangan, industri pariwisata, dan manufaktur termasuk usaha kecil menengah, yang berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat. Pemutusan hubungan kerja, baik tetap maupun tidak tetap, menyebabkan situasi dan kondisi masyarakat sangat rentan terhadap masalah sosial dan ekonomi. Pelayanan publik di Dinas Sosial tidak hanya sekedar administrasi kependudukan dan kesejahteraan masyarakat, mereka juga peduli dengan peningkatan taraf hidup sosial

masyarakat. Jika warga yang sehat memiliki pangan yang cukup, maka akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan penduduk, kehadiran pemerintah di masyarakat harus ada dan dibutuhkan, dan penduduk harus di didik bagaimana hidup sehari-hari.

Rencana untuk mengurangi dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat miskin dan rentan adalah kebijakan pemberian bantuan sosial dalam bentuk Program Tawadhu. Namun, meskipun bermanfaat bagi masyarakat, pelaksanaan Program Tawadhu masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran.. Dinas Sosial adalah bagian dari pemerintahan Indonesia yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan yang lebih tinggi dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan di bawahnya. Karena Dinas Sosial merupakan unit pemerintahan dalam suatu komunitas pemerintahan negara, maka dapat dikatakan bahwa jumlah partisipasi masyarakat lokal dan aparatur pemerintah setempat dalam perencanaan pembangunan menentukan keberhasilannya. Pembangunan dan pelayanan publik tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, namun mereka harus melibatkan semua pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar birokrasi publik (masyarakat). Kepala Dinas adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Pemerintah Kota/Kabupaten, yang memperoleh pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari Gubernur untuk mengurus urusan otonomi daerah tertentu dan melaksanakan tanggung jawab pemerintahan umum dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai seorang

pemimpin, Kepala Dinas memiliki berbagai tanggung jawab, termasuk katalis, fasilitator, pemecah masalah, dan komunikator. Adapun tugas dan kewajiban Kepala Dinas adalah menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan yang diberikan oleh Walikota/Bupati, serta kewajiban-kewajiban pemerintah lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hubungan kerja Dinas Sosial dan Pemerintah Kota bersifat hierarkis. Pembentukan Dinas Sosial dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat waktu dan efisien, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan kemajuan masyarakat.

Meskipun Dinas Sosial memiliki catatan atau data tentang kemiskinan khususnya di Kota Bogor, akan tetapi perlu lebih banyak dikaji Kembali terkait sasaran yang akan mendapatkan bantuan dari Program Tangani Warga Dhuafa ini. Dalam hal ini tentunya akan lebih jauh ditelusuri mengenai dana yang akan diterima berapa kali dalam setahun dan berapa jumlah dana yang akan diterima. Sehingga laporan ini dapat menjadi salah satu bantuan untuk menjembatani ketepatan sasaran dalam implementasi program Tahwadhhu.

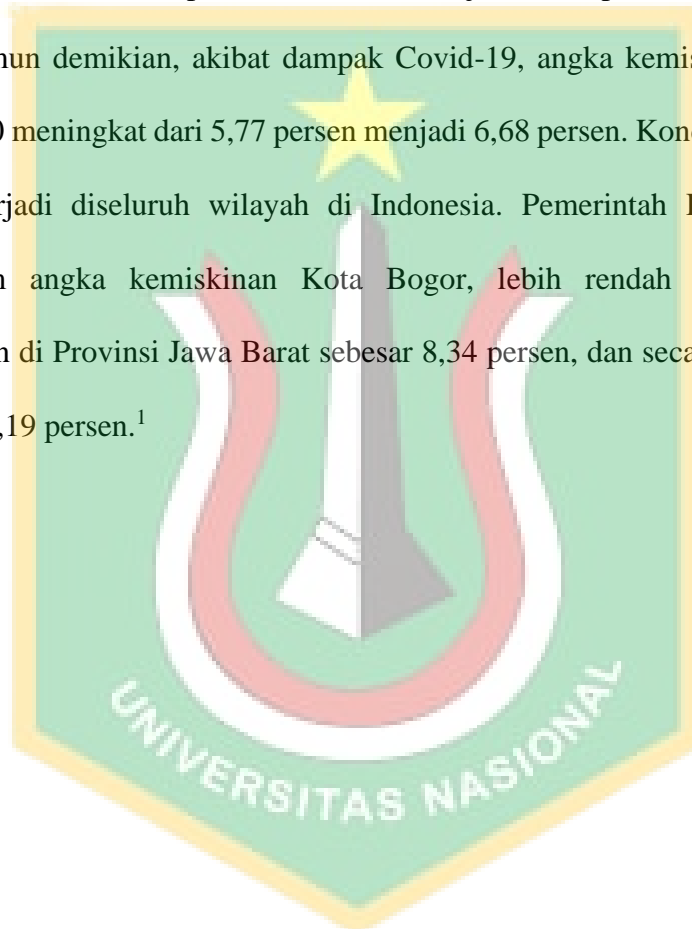
Dengan penjelasan pada beberapa paragraf di atas, penulis akan menjelaskan bagaimana prosedur penyaluran dana bantuan sosial dan jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada kaum dhuafa. Kaum Dhuafa adalah dapat disebut sebagai golongan orang yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan penderitaan, dan bentuk ketidakberuntungan lainnya. Dari sinilah penulis termotivasi dengan pembuatan laporan Skripsi ini bahwa bagaimana peran dan tanggungjawab pemerintah di bidang sosial.

Permasalahan pada sistem program Tangani Warga Dhuafa yang belum merata sehingga pengelolaan pembagian masih kurang tepat sasaran, dan bantuan yang ada belum dapat terealisasi dengan baik. Dengan pelaksanaan penelitian yang menghasilkan sebuah laporan rinci tentang bantuan dana jaminan sosial ini ada manfaatnya bagi masyarakat setempat dan lainnya agar mengetahui bagaimana prosedur dana yang telah direncanakan pemerintah sesuai kesepakatan pengurus-pengurus Negara Indonesia, untuk lebih memperkuat dalam penulisan Latar Belakang ini pun mengacu pada Perwali Kota Bogor No. 133 Tahun 2019 Tentang Petunjuk dan Pelaksanaan. Dengan demikian, penulis menyimpulkan agar melakukan penelitian pada salah satu Dinas yang sangat berkaitan dengan teori ini yaitu Dinas Sosial dengan judul “Program Tangani Warga Dhuafa Dinas Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bogor”

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor jumlah penduduk kota Bogor sebanyak **1.099.422 jiwa**, dengan kepadatan 9.278 jiwa/km², BPS sempat menyebut meningkatnya angka kemiskinan di Kota Bogor pada dua tahun terakhir lebih dikarenakan angka kemiskinan nasional yang juga meningkat. Tercatat, sejak 2013 hingga 2019 jumlah warga miskin di Kota Bogor terus menurun. Pada tahun 2013 jumlah warga miskin di Kota Bogor ada sebanyak 83,3 ribu jiwa, tahun 2014 menjadi 80,1 ribu jiwa. pada tahun 2015 Pemerintah Kota Bogor mampu menekan angka kemiskinan di Kota Bogor menjadi 79.2 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 77.3 ribu jiwa, dan pada tahun 2017 angka kemiskinan kembali menurun di posisi 76.5 ribu jiwa. Berlanjut pada 2018 turun menjadi 64.85 ribu jiwa dan pada 2019

turun menjadi 63.97 ribu jiwa. Namun pada tahun 2020, angka kemiskinan merangkak naik kembali yakni sebanyak 75,04 ribu jiwa. Angka warga miskin tersebut hampir sama dengan angka kemiskinan pada tahun 2015.

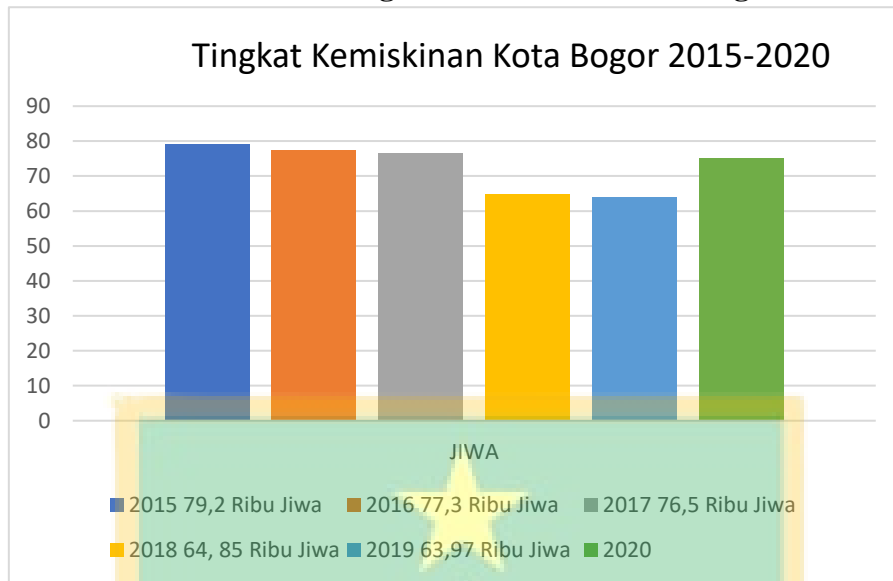
Pihak Pemerintah Kota menyebut secara umum, tingkat Kemiskinan Kota Bogor dari tahun 2015 hingga 2019 terus menurun. Pada 2015 angka kemiskinan sebesar 7,6 persen menurun menjadi 5,77 persen pada tahun 2019. Namun demikian, akibat dampak Covid-19, angka kemiskinan pada tahun 2020 meningkat dari 5,77 persen menjadi 6,68 persen. Kondisi tersebut hampir terjadi diseluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah Kota Bogor mengklaim angka kemiskinan Kota Bogor, lebih rendah dari angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat sebesar 8,34 persen, dan secara Nasional sebesar 10,19 persen.¹



Gambar 1.1

¹ Diakses melalui web <https://kotabogor.bps.go.id> pada tanggal 3 Oktober 2022

Grafik Tingkat Kemiskinan Kota Bogor



(Sumber Data : BPS Kota Bogor, 2021)

Menurut data BPS Kota Bogor wilayah Kota Bogor dengan data diatas menyebutkan bahwa daya beli masyarakat di Kota Bogor dengan ini melemah di segala sektor dan mengakibatkan penurunan. perekonomian masyarakat, serta banyaknya masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan, untuk itu Dinas Sosial selaku penggagas Program Tangani Warga Dhuafa berupaya memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat khususnya di sektor ekonomi. Mereka yang pendapatannya semakin berkurang menuntut peran pemerintah lebih aktif. Pemerintah setempat memberikan paket sembako, alat dagang dan alat kesehatan kepada warga yang kurang mampu melalui Program Tangani Warga Dhuafa ini adalah contoh kepedulian Pemerintah Kota Bogor khususnya Dinas Sosial Kota Bogor terhadap masyarakat atau individu setempat yang sangat membutuhkan bantuan.

Pada data berikut dapat dilihat dan diketahui bahwa jumlah keseluruhan dari warga yang menerima bantuan Program Tangani Warga Dhuafa pada tahun Januari 2021 hingga Desember 2021 sudah didistribusikan kepada warga yang membutuhkan pada tahun Januari 2021-2021 Desember sebanyak 43 alat dagang (gerobak/etalase), 37 kursi roda, dan 60.563 sembako dan uang tunai. Lalu ditahun 2022 Januari-Desember sebanyak 27 (gerobak/etalase), 41 kursi roda, dan 29.715 sembako dan uang tunai. Oleh karena itu target dan sasaran dibagi menjadi 3 kriteria yaitu penerima gerobak/etalase, kursi roda, dan sembako. Dinas Sosial terus berupaya untuk selalu memaksimalkan Program Tangani Warga Dhuafa ini yang bertujuan untuk mensejahterahkan warganya yang membutuhkan dengan mengklasifikasi sesuai dengan kebutuhan para warga.²

Tabel 1.1
Jumlah Penerima Bantuan Program Tangani Warga Dhuafa

NO.	Tahun	Sembako dan Uang Tunai	Alat Dagang	Alat Kesehatan
1.	2021	60.563	43	37
2.	2022	29.715	27	41

(Sumber Data : Dinas Sosial Kota Bogor, 2022)

Prosedur pelaksanaan Program Tangani Warga Dhuafa adalah Dinas Sosial memberikan akses Program Tawadhu kepada seluruh Kecamatan di

² Diakses melalui web dinsos.kotabogor.go.id pada tanggal 3 Oktober 2022

wilayah Kota Bogor memberikan narahubung Program Tawadhu itu di Grup WhatsApp masing-masing Kecamatan dan Kelurahan. Lalu warga yang membutuhkan bisa langsung mengirim WhatsApp ke narahubung Program Tangani Warga Dhuafa atau bisa langsung datang ke kantor Dinas Sosial dibagian Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Di WhatsApp itu ada pilihan untuk mereka membutuhkan alat dagang, sembako atau alat Kesehatan adapun di tempat Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Setelah itu petugas dari Dinas Sosial akan minta alamat warga tersebut lalu tim humas yang akan memantau ke lokasi bersama Lurah dan RW setempat untuk survei apakah warga tersebut pantas mendapatkan bantuan atau tidak, setelah itu tim humas yang akan melaporkan kepada Petugas dari Dinas Sosial. Apabila masuk kriteria dan bantuanya sedang tersedia akan langsung di distribusikan. Sumber dana Program Tangani Warga Dhuafa ini berasal dari APBD dan hasil dari swadaya masyarakat yang berupa barang.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil dan mengkaji penelitian dengan judul “Program Tangani Warga Dhuafa Dinas Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bogor”. Alasan penulis mengambil judul ini karena penulis melihat bahwa permasalahan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sangat terpuruk dan penulis tertarik untuk mengkaji Program Tangani Warga Dhuafa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bogor dan kriteria warga yang berhak mendapatkan bantuan untuk mengatasi krisis kesejahteraan masyarakat dan kesenjangan ekonomi bagi warganya yang mengalami kesulitan. Maka penelitian ini sangat penting terhadap studi kasus khususnya dibidang

program bantuan sosial dan kajian ini bermanfaat pada Ilmu Administrasi Publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan Skripsi, yaitu sebagai berikut :

Bagaimana Program Tangani Warga Dhuafa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dinas Sosial Kota Bogor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Skripsi merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh seluruh Mahasiswa/I Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional dengan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam laporan Skripsi yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui Program Tangani Warga Dhuafa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dinas Sosial Kota Bogor.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat 3 (tiga) manfaat yang akan dibahas dalam laporan Skripsi, yaitu :

1. Bagi Dinas Sosial

- a. Untuk memudahkan dinas dalam pengurusan data-data penerima bantuan.

- b. Agar informasi tentang penerimaan bantuan seperti ini dapat berkembang luas dan diketahui masyarakat.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan karena merupakan salah satu syarat kelulusan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional.

- b. Untuk mempraktekkan ilmu teori yang didapat di perkuliahan ke lapangan (Instansi Pemerintah).

- c. Meningkatkan pengetahuan dalam dunia kerja.

- d. Terbiasa bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan kerja.

3. Bagi Masyarakat

- a. Menjadi pedoman dalam pengurusan penerimaan bantuan.

- b. Mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial yang sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat.

- c. Mengetahui apakah kinerja pemerintah di bidang ini berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara Teoritis di harapkan dapat nilai tambah pengetahuan khususnya dan dapat Memberikan sebuah kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang sudah di pelajari selama ini. Selain itu juga dapat di harapkan juga

penelitian ini dapat di jadikan referensi untuk di jadikan penelitian selanjutnya dengan topik pembahasan yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis dapat di harapkan untuk memberikan masukan kepada Dinas Sosial Kota Bogor untuk memberikan saran atau pendapat sebagai Masyarakat dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan memberikan inovasi pelayanan publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan serta membagikan arah dan cerminan modul yang tercantum dalam riset penulisan ini, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika yang terdiri dari 5 Bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menguraikan hal-hal yang menyangkut latar belakang kasus, pokok kasus, tujuan, manfaat, serta sistematika penelitian.

BAB II Kerangka Teoritik

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai teori-teori dan konsep yang diambil dari beberapa literatur yang relevan sebagai landasan dari penelitian ini.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini, penulis hendak menguraikan pendekatan riset, kategori riset, Metode Pengumpulan Informasi, Metode pengecekan

keabsahan informasi, serta analisis informasi lewat pengelolaan informasi serta interpretasi ataupun pemaknaan informasi.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini, peneliti menjabarkan analisis data gambaran universal mengenai Dinas Sosial Kota Bogor dan juga mengenai Program Tangani Warga Dhuafa Dinas Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bogor

BAB V Penutup

Dalam bab ini membahas mengenai beberapa kesimpulan dari penelitian yang akan dijadikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

